



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Januari 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : YUDIKATIF  
**LEMBAGA** : MAHKAMAH AGUNG  
**UNIT KERJA** : PENGADILAN TINGGI BANDUNG

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **ABDUL FATTAH**
2. Jabatan : **HAKIM TINGGI**
3. NHK : **3267**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 3.582.432.000**

1. Tanah Seluas 2500 m2 di ACEH UTARA, WARISAN Rp. 162.500.000
2. Tanah Seluas 500 m2 di ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000
3. Tanah Seluas 6911 m2 di ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 82.932.000
4. Tanah Seluas 530 m2 di KOTA BANDA ACEH , HASIL SENDIRI Rp. 1.060.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 558 m2/207 m2 di KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 2.232.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp. 433.000.000**

1. MOBIL, HONDA CR-V MINIBUS Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
2. MOBIL, HONDA JAZZ MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000
3. MOBIL, MIT MITSUBISHI PAJERO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 240.000.000
4. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** **Rp. 177.664.006**

**D. SURAT BERHARGA** **Rp. ----**

**E. KAS DAN SETARA KAS** **Rp. 526.015.612**



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	4.719.111.618
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.719.111.618

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.